



DOKUMENTASI
UNIVERSITAS TERBUKA

KORUPSI

SEBAGAI PERILAKU MENYIMPANG

dilihat dari perspektif sosiologis

oleh

DRA. PARWITANINGSIH

NIP. 132 052 360

UNIVERSITAS TERBUKA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

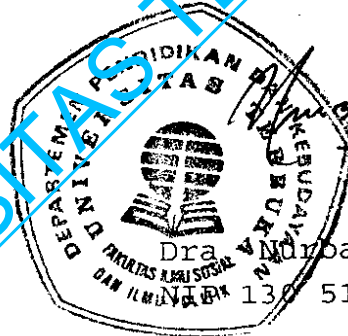
1995

LEMBAR PERSETUJUAN

Makalah : KORUPSI
SEBAGAI SUATU PERILAKU MENYIMPANG

Mengetahui

DEKAN FISIP - UT



Dra Nurbaedah Dachlan, MS

130 519 123

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan lindungan-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan makalah dengan judul : Korupsi sebagai Perilaku Menyimpang, dilihat dari Perspektif Sosiologis.

Tulisan ini disusun untuk memenuhi persyaratan pemenuhan pengembangan disiplin ilmu sosiologi serta pemenuhan KUM sebagai tenaga edukatif di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di lingkungan Universitas Terbuka.

Dalam penyusunan makalah ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan FISIP Universitas Terbuka yang telah memberikan pengarahan serta bantuan.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, maka makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak. Akhir kata semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu sosiologi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Jakarta, April 1995

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar belakang masalah	1
I.2. Permasalahan	3
I.3. Landasan Teoritik	3
BAB II KORUPSI	8
BAB III KORUPSI SEBAGAI PERILAKU MENYIMPANG	16
BAB IV KESIMPULAN	25
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan benalu sosial yang merusak sendi-sendi struktur pemerintahan, dan menjadi hambatan paling utama bagi pembangunan. Ada orang yang mengatahakan, korupsi merupakan seni hidup dan menjadi salah satu aspek kebudayaan kita.

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat, yang memaknai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga menduduki status sosial yang tinggi.

Korupsi dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan negara untuk memperoleh penghasilan, keuntungan atau prestise seseorang atau untuk memberi keuntungan bagi sekelompok orang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau dengan norma ahlak yang tinggi.^{1/} Kegiatan ini banyak dijumpai hampir disemua strata masyarakat terutama yang berkaitan dengan kegiatan birokrasi.

1. J.W. Schoorl, Moedenisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara Berkembang, terjemahan oleh R.G. Soekadijo,, Gramedia, Jakarta, 1984, hal 175

Kasus-kasus mengenai korupsi merupakan kasus yang telah usang tetapi menantang kita untuk menyelesaikannya karena ia selalu hadir dalam masyarakat akibat kondisi sosial budaya dan politik masyarakat yang bersangkutan. Korupsi merupakan masalah yang secara fenomena sudah usang tetapi masih tetap aktual secara problema. Usang karena sudah terlalu lama diketahui dan berkali-kali diberitakan tetapi aktual karena masalah korupsi semakin laten dan parah. Sebagai contoh dapat dikemukakan data dari Kejaksaan Agung, sejak tahun 1983 - 1985 akhir di Indonesia telah terjadi sekitar 33716 kasus korupsi yang merugikan uang negara sebesar 276,96 miliar rupiah.^{2/}

Latar belakang terjadinya korupsi banyak disebabkan oleh beberapa faktor yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Wertheim menerangkan bahwa anggapan-anggapan tradisional yang tumbuh di dalam masyarakat yang sudah maju merupakan sebagian faktor penyebab gejala korupsi. Hal ini ditambah atau diperkuat lagi dengan adanya struktur birokrasi patrimonial yang masih banyak dijumpai di negara berkembang.^{3/} Bintoro Tjokroamidjojo, mengatakan bahwa penyebab tumbuhnya penyakit korupsi adalah karena

-
2. Ayip Bakar, Korupsi : Usang tetapi Menantang, dalam Surabaya Post, 25 Pebruari 1988
 3. J.W. Schoorl, ibid, hal 179

lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian serta sifat serakah dari manusia-manusia pemberi pelayanan pada masyarakat. Pengawasan yang telah ditangani oleh beberapa lembaga yang ada belum dilakukan dengan efektif dan optimal. Ini harus diakui sebab memang ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Penyebab yang menjadi jati diri adalah pengawasan belum menjadi kebudayaan. Penghalang kebudayaan pengawasan antara lain sifat rikuh pakewuh (malu) untuk saling mengkritik terutama mengkritik atasan.

Berangkat dari fenomena yang ada di masyarakat, maka penulis ingin melihat korupsi dari sudut perspektif sosiologi sebagai suatu perilaku menyimpang.

I.2. PERMASALAHAN

Permasalahan yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah :

1. Apakah hakekat dari korupsi ?
2. Bagaimana korupsi bila dilihat sebagai suatu perilaku yang menyimpang ?

I.3. LANDASAN TEORITIK

Dorongan yang datang dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu dinamakan motif. Motif diartikan sebagai suatu kekuatan yang

4. Penyakit Korupsi Timbul karena Lemahnya Sistem, dalam Kompas, 9 Agustus 1989

terdapat dalam diri organisme yang menyebabkan organisme melakukan suatu tindakan. Dorongan ini tertuju kepada suatu tujuan tertentu sehingga tindakan yang dihasilkan oleh motif ini dapat dibedakan dua yaitu tindakan yang tidak disengaja dan tindakan yang disengaja. Kerap kali kita tidak dapat menunjukkan batasnya tetapi kita dapat membedakannya. Sebelum orang bertindak, seakan-akan orang tersebut berdiri pada persimpangan, ia menghadapi jalan ke kanan dan ke kiri tetapi dialah yang menentukan tujuan manakah yang dijalani. Sebelum tahu akan tujuan ia tidak akan bertindak.

Parson -- dalam bukunya *The Structure Of Social Action* -- menekankan bahwa tindakan manusia diarahkan dari dalam batin oleh tujuan-tujuan tertentu yang didasarkan atas nilai-nilai dan norma-norma yang dibagi bersama dengan orang-orang lain. Oleh karena itu Parson memandang tindakan manusia berasal dari keinginannya, kemauannya, keputusannya dan tujuannya sebagai unsur utama dari sistem interaksi yang terdiri dari kekuatan-kekuatan sosial.

Dalam analisisnya Parson banyak menggunakan kerangka alat tujuan (means-ends framework). Inti

-
5. Poedjawijatna, Etika Filasafat Tingkah Laku, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal 23
 6. K.J. Veerger, Realitas Sosial, Gramedia, Jakarta, 1986, hal 200

pemikiran Parson mengenai tindakan manusia adalah bahwa (1) tindakan itu diarahkan pada tujuannya atau memiliki suatu tujuan (2) tindakan itu terjadi dalam situasi dimana beberapa elemennya sudah pasti, sedangkan elemen-elemen lainnya digunakan oleh yang bertindak sebagai alat untuk menuju tujuan dan (3) secara normatif tindakan itu diatur sehubungan dengan penentuan alat dan tujuan. Singkatnya tindakan dilihat sebagai satuan kenyataan sosial yang paling kecil, yang paling fundamental. Komponen dasar dari satuan tindakan adalah alat, tujuan, kondisi dan norma. Alat dan kondisi berbeda dalam hal di mana orang yang bertindak itu mampu menggunakan alat dalam usahanya mencapai tujuan, kondisi merupakan aspek situasi yang tidak dapat dikontrol oleh yang bertindak itu .^{7/}

Terjadinya perilaku menyimpang (sebagaimana perilaku konform) merupakan suatu gejala yang wajar dalam setiap kehidupan masyarakat, karena ditetapkan atau dipersepsikan sebagai menyimpang dari aturan normatif yang berlaku pada saat tertentu tergantung pada penetapan atau persepsi masyarakat.

Cohen mendefinisikan perilaku menyimpang antara lain sebagai (a) tingkah laku yang menyimpang dari aturan normatif atau dari pengharapan masyarakat, (b)

7. Doyle P. Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Moderen, Gramedia, Jakarta, 1986, hal 106.

tingkah laku yang secara statistis abnormal, (c) tingkah laku yang patologis, (d) tingkah laku yang secara sosial dinilai tidak baik dan tingkah laku yang berhubungan dengan peranan menyimpang (deviant role) ^{8/}.

Timbulnya perilaku menyimpang seringkali merupakan konsekwensi dari kontrol sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Kontrol sosial atau sistem pengendalian sosial seperti yang dikemukakan Soerjono Soekanto seringkali diartikan sebagai pengawasan masyarakat terhadap segala proses baik yang direncanakan maupun yang tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. ^{9/}

Jadi pengendalian sosial dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya atau mungkin individu terhadap suatu kelompok. Semakin kuat kontrol sosial yang diterapkan dalam masyarakat semakin dapat ditekan dilakukannya perilaku menyimpang. Oleh karena itu menurut pandangan Lemert, bentuk kontrol sosial yang diterapkan erat hubungannya dengan jenis penyimpangan. ^{10/}

Masalah perilaku menyimpang menurut new

-
8. Saparinah Sadli, Persepsi Sosial mengenai perilaku menyimpang, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal 16
 9. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, CV. Rajawali, Jakarta 1982, hal 199
 10. Saparinah Sadli, ibid, hal 18

perspective merupakan suatu analisa yang dinamis. Perilaku menyimpang hanya dapat dimengerti sebagai sesuatu yang selalu berubah-ubah dan merupakan refleksi proses yang kompleks. Pendekatan ini lebih mementingkan mengerti proses yang berlangsung di mana tindakan yang kompleks dielaborasi dan ditransformasi oleh reaksi orang lain menjadi perilaku menyimpang. Inti penting konsep perilaku menyimpang menurut New Perspective ini adalah reaksi orang lainlah yang menetapkan suatu tindakan dikatakan menyimpang atau tidak.

11/
UNIVERSITAS TERBUKA

11. Saparinah Sadli, ibid, hal 25

BAB II

KORUPSI

Menurut pemakaian umum istilah korupsi apabila seseorang menerima pemberian yang disodorkan oleh pihak lain dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Terkadang perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda juga tercakup dalam konsep ini. Pererasan yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik juga bisa dipandang sebagai "korupsi". Sesungguhnya istilah itu terkadang juga dikenakan pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus untuk keuntungan mereka sendiri, dengan kata lain, mereka yang bersalah melakukan penggelapan atas harga yang harus dibayar oleh publik.^{12/}

Fenomena lain yang bisa dipandang sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman, atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan publik. Hal ini biasa disebut dengan nepotisme.

-
12. Syed Husin Alatas, Sosiologi Korupsi, Sebuah penjelajahan dengan data kontemporer, LP3ES, Jakarta, 1983, hal 11

Dengan demikian terdapat tiga tipe yang tercakup dalam istilah korupsi yaitu : penyuapan, pemerasan dan nepotisme. Meskipun ketiga tipe ini tidak sama sekali sama tapi ada suatu benang merah yang menghubungkan yaitu penempatan kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan-tujuan privat dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan dan dibarengi dengan keserbarahasiaan, pengkhianatan dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik.^{13/}

Secara eksplisit korupsi dapat didefinisikan sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala : salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

Korupsi menurut pengertian sosiologi seperti yang dikemukakan oleh H. A. Brasz adalah sebagai penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal,

13. Syed Husin Alatas, ibid, hal 12 :

dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalih menggunakan kekuasaan itu dengan sah^{14/}

Dengan demikian dapat disebutkan unsur-unsur dari definisi korupsi tersebut, yaitu :

1. Kekuasaan yang dialihkan.
2. Kekuasaan yang dialihkan itu dipakai berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan atau berdasarkan kemampuan-kemampuan yang formal.
3. Kekuasaan yang dialihkan itu dipakai untuk merugikan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan yang asli.
4. Kekuasaan yang dialihkan dipakai untuk menguntungkan atau merugikan orang lain.
5. Pemakaian wewenang dan kekuasaan formal secara tersembunyi dengan dalih menurut hukum.

Korupsi memang berlangsung pada semua lapisan masyarakat. Namun pada masyarakat yang tengah melakukan modernisasi, korupsi ini paling banyak terjadi. Biasanya korupsi itu bersamaan dengan pembangunan industri, perkembangan sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru serta bersamaan pula dengan terampilnya

 14. Mochtar Lubis dan James C. Scott, Bunga Rampai Korupsi, LP3ES, Jakarta, 1985, hal 4

klas-klas baru yang banyak mengajukan tuntutan baru kepada pihak pemerintah.

Korupsi merupakan salah satu kriterium dari tidak adanya institusionalisasi politik yang efektif dan kurang berfungsinya sistem kontrol dan yudikatif. Banyak pegawai negeri dan pejabat tidak lagi punya otonomi dalam arti mereka sudah terbelenggu oleh suapan dan sogokan, sebab mereka justru mengkaitkan peranan kelembagaannya dengan tuntutan eksternal yaitu pihak yang menyuap atau memberikan hadiah-hadiah.

Sebab-sebab munculnya korupsi yang cenderung lebih banyak pada era modernisasi adalah karena : ^{15/}

1. Modernisasi menimbulkan perubahan-perubahan nilai yang paling mendasar di masyarakat, khususnya dalam hal norma-norma, harapan, prestasi (n - Ach) dan ambisi materiil. Hal ini menyebabkan atau mendorong orang untuk meninggalkan beberapa pola tingkah laku tradisional dan tata susila tertentu. Konflik yang terjadi antara norma modern dan tradisional menyebabkan individu untuk bertindak sendiri-sendiri, dengan caranya sendiri dan demi kepentingannya sendiri pula.

15. Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, hal 93

2. Mordenisasi menghasilkan sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, tanpa menyertakan tegaknya lembaga-lembaga kontrol yang seimbang. Kemudian banyak usaha yang ditujukan ke arah usaha pensejahteraan diri sendiri atau keluarga sendiri. Maka banyak jabatan dan fungsi formal lalu dimanfaatkan untuk tindak manipulatif dan macam-macam bentuk penyimpangan tingkah laku.
3. Mordenisasi memungkinkan perluasan otoritas dan kekuatan pemerintah, serta melipatgandakan aktivitas-aktivitas pembangunan dan pengaturan yang semuanya memberikan celah-celah kemungkinan bagi tindak korupsi serta penindasan penekanan terhadap pihak yang lemah dan bodoh. Hal ini tergantung pada sukar mudahnya melanggar peraturan tersebut.
4. Pergeseran nilai dan norma etis dalam periode transisional dan mordenisasi dengan perubahan-perubahan yang maha cepat jelas memunculkan bentuk mentalitas baru yaitu mentalitas menempuh jalan pintas, memotong jalan orang, menyerobot ke depan. Pokoknya mengkondisionir munculnya mentalitas korupsi.
5. Di negara-negara berkembang termasuk juga Indonesia, mordenisasi pada umumnya belum

ditunjang oleh pengembangan lembaga politik, bahkan dibarengi dengan melemahnya institusi-institusi politik.

Selain dari pada itu korupsi juga dapat disebabkan oleh kebutuhan ekonomi. Dibanyak negara sedang berkembang gaji pegawai, setidaknya pegawai rendahan, tidak cukup untuk hidup secara layak. Dapatlah dipahami, bahwa dalam situasi yang demikian ini para pegawai terpaksa mencari penghasilan tambahan dan banyak juga dari mereka yang mendapatkannya dengan meminta uang ekstra (uang lelah).

Korupsi juga bisa disebabkan oleh keinginan pegawai, yang tidak mau kalah tata kehidupannya dengan golongan-golongan masyarakat lainnya. Di mana golongan masyarakat yang dijadikan perbandingan adalah mereka yang memiliki tingkat kehidupan yang cukup tinggi.

Dengan adanya korupsi tentu saja akan menimbulkan akibat-akibat, baik itu akibat yang positif ataupun akibat yang negatif. Akibat-akibat perbuatan korupsi yang merusak antara lain adalah :

1. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Uang suap tidak hanya dapat memperlancar prosedur administratif, akan tetapi biasanya juga berarti kesengajaan untuk memperlambat proses adminitrasi, agar dengan demikian dapat menerima uang suap.
2. Korupsi menyebabkan kenaikan biaya

administrasi. Seberapa jauh pelipatgandaan biaya tambahan tergantung pada kemampuan pasaran.

3. Jika korupsi terjadi dalam bentuk "komisi", akan mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya untuk keperluan umum. Ini memang merupakan pengalihan sumber-sumber kepentingan umum untuk kepentingan perseorangan.
4. Korupsi dikalangan aparat pemerintah yang dilihat oleh khalayak umum menurunkan martabat pemerintah sendiri. Korupsi menjatuhkan kepercayaan masyarakat akan tindakan adil pemerintah.

Sedangkan akibat positif dari perbuatan korupsi, meskipun ini tidak selalu demikian bahwa dengan akibatnya ada yang positif maka perbuatan itu baik atau tidak tercela, antara lain :

1. Korupsi memberi jalan untuk memperlunak kekerasan suatu rencana pembangunan ekonomi dan sosial suatu golongan elit tertentu. Jika saluran-saluran politik tersumbat maka korupsi membuka jalan masuk ke dalam urusan pemerintahan.
2. Korupsi membuka jalan untuk memberi kelompok-kelompok yang akan mengalami akibat jelek jika tidak ikut dalam kekuasaan. Hingga seberapa jauh mereka dapat diikutsertakan

dalam sistem kekuasaan itu tergantung dari kemahiran serta kesediaan mereka menggunakan kesempatan untuk melakukan korupsi.

3. Kesempatan korupsi dapat meningkatkan mutu pegawai negeri. Karena jika seseorang ingin mengabdikan pada negerinya mungkin akan menolak untuk melakukan korupsi meskipun kesempatan itu ada dan ia berpenghasilan rendah.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

KORUPSI
SEBAGAI
PERILAKU MENYIMPANG

Masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari individu-individu yang berinteraksi, interrelasi dan interdependensi. Sebagai suatu sistem sosial maka masyarakat tidak dapat terlepas dari norma-norma yang mengatur setiap tindakan individu dalam masyarakat tersebut.

Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh Parson disebutkan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat 4 (empat) fungsi masyarakat, yaitu apa yang sering disebut dengan AGIL (adaptation, goal attainment, integration, dan latent pattern maintenance).

Khususnya pada fungsi pemeliharaan pola ini, menunjuk pada masalah bagaimana menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma.^{16/} Fungsi pemeliharaan pola ini juga menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dan sistem kultural sebagai sistem tindakan manusia. Sistem kultural itu sendiri berfungsi menyatukan bagian-bagian atau sub unit yang berbeda, menyediakan dasar pembenaran pola peraturan normatif

16. Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hal 182

serta memberikan orientasi yang penuh arti terhadap tingkah laku anggota masyarakat .^{17/}

Tetapi yang paling penting dari semuanya ialah bahwa dalam sistem sosial itu selalu terdapat norma-norma yang secara formal maupun non-formal mengatur dan mengontrol setiap tindakan manusia .^{18/} Norma-norma yang paling formal dan universal terdapat dalam suatu sistem hukum masyarakat.

Dalam masyarakat primitif , korupsi jaranga terdapat. Hal ini disebabkan oleh dominasi dari tradisi dalam penentuan tingkah laku manusia, dan adanya kontrol langsung oleh segenap anggota masyarakat kecil itu. Sejalan dengan pernyataan ini, maka korupsi berkembang dengan semakin majunya dunia ekonomi dan politik, bersamaan pula dengan kecepatan mordenisasi ekonomi dan sosial. Korupsi berlangsung pada semua lapisan masyarakat, namun pada masyarakat yang tengah melaksanakan mordenisasi, korupsi ini paling banyak terjadi.

Pada umumnya korupsi itu timbul seiring dengan pembangunan industri, perkembangan sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Adanya korupsi dalam masyarakat bersamaan pula dengan tampilnya klas-klas

17. Ankie M.M. Hoogvelt, Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang, Rajawaali Pers, Jakarta, 1985, hal 45
18. Ian Craib, Teori-teori Sosial Modern, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hal 61

baru yang banyak mengajukan tuntutan-tuntutan baru kepada pihak pemerintah. Pemberian hak-hak monopoli dan macam-macam privilege oleh para penguasa, baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah, biasanya diperlicin dengan jaalan penyipuan atau sogokan.

Korupsi merupakan salah satu kriterium dari tidak adanya institusionalisasi politik yang efektif, serta kurang berfungsinya sistem kontrol dan yudikatif. Hal ini disebabkan mordenisasi memang telah menimbulkan perubahan-perubahan nilai yang paling mendasar di masyarakat, khususnya dalam hal norma-norma, harapan, prestasi (need for Achievement) dan ambisi materiil. Standard-standard serta kriteria baru mengenai baik buruk, mendorong orang meninggalkan beberapa pola tingkah laku tradisional dan tata susila tertentu, lalu mengejar pola-pola korup. Konflik-konflik antara norma-norma modern melawan norma-norma tradisional itu membuka kesempatan bagi individu-individu untuk bertindak sendiri-sendiri, dengan cara masing-masing, bertindak seenaknya sendiri, dan demi kepentingannya sendiri.

Pola hidup sederhana dan jujur yang diagungkan dimasa lalu, pada periode mordenisasi menjadi bahan cemoohan dan bahan sindirin satiristis^{19/}. Sebaliknya cara hidup eliter dengan konsumsi mewah dan

19. Kartini Kartono, op cit, hal 96

pola jet-set, menjadi modus tingkah laku. Modernisasi pun ikut mendorong peningkatan ambisi-ambisi sosial dan materiil serta memupuk nafsu memiliki. Pemenuhan dorongan, ambisi serta kebutuhan-kebutuhan baru itu dicapai orang, baik dengan cara-cara konvensional maupun inkonvensional. Kondisi seperti ini semakin menyuburkan mentalitas korupsi, yaitu dengan menggunakan cara-cara pencapaian dan aturan main yang mereka buat sendiri. Kalau perlu, bahkan menggunakan jalan pintas yang deviatif, menyimpang dari hukum dan norma-norma umum yang berlaku dalam masyarakat.

Berkaitan dengan cara-cara yang inkonvensional dan bersifat deviatif atau menyimpang dari hukum dan norma-norma umum yang berlaku dalam masyarakat, banyak Sosiolog mempersamakan tingkah laku yang menyimpang dengan tingkah laku abnormal atau maladjusted (tidak mampu menyesuaikan diri). Definisi tingkah laku abnormal/menyimpang disini adalah tingkah laku yang tidak sesuai, tidak serasi atau tidak tepat (adequate), tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada .^{20/}

Penyimpangan tingkah laku itu tidak pernah berlangsung dalam isolasi, tidak berlangsung sui generis (unik, khas satu-satunya dalam jenisnya) dan dalam keadaan vakum. Akan tetapi selalu berlangsung

20. Kartini Kartono, ibid, hal 13.

dalam satu konteks sosio-kultural dan antar-personal. Jadi sifatnya bisa organisme atau fisiologis, juga bisa psikis, interpersonal, antarpersonal dan kultural. Sehubungan dengan lingkungan sosio-kultural ini, penyimpangan tingkah laku dapat dibagi menjadi : (1) deviasi individual, (2) deviasi situasional, (3) deviasi sistematis. Tetapi untuk menjelaskan tindakan korupsi ini akan digunakan deviasi situasional yang memang telah banyak mengalami perubahan, sebagai akibat dari adanya modernisasi.

Deviasi situasional disebabkan oleh pengaruh bermacam-macam situasional/sosial di luar individu, atau oleh pengaruh situasi dalam mana pribadi yang bersangkutan menjadi bagian integral daripadanya. Situasi tersebut memberikan pengaruh yang memaksa, sehingga individu dalam hal ini terpaksa melanggar peraturan dan norma-norma umum atau hukum formal^{21/}. Individu-individu maupun kelompok-kelompok tertentu bisa mengembangkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma susila atau hukum, sebagai produk dari transformasi-transformasi psikologis yang dipaksakan oleh situasi dan kondisi lingkungan sosialnya.

Ruang dan waktu merupakan dimensi-dimensi pokok dari situasi sosial, yang memberikan pengaruh menekan dan memaksa individu. Khususnya, situasi dan kondisi

21. Kartini Kartono, *ibid*, hal 19

sosial atau sosio-kultural yang repetitif selalu berulang-ulang, dan terus menerus, akan mengkondisionir dan memperkuat deviasi-deviasi, sehingga kumulatif sifatnya. Deviasi kumulatif sedemikian ini bisa menjelma menjadi disintegrasi sosial atau disorganisasi sosial. Terutama apabila deviasi ini berlangsung pada bagian terbesar dari populasi atau anggota masyarakat pada umumnya. Peristiwa ini disebut pula sebagai deviasi kumulatif. Contoh yang menyolok dari deviasi kumulatif ini ialah korupsi.

Selanjutnya reaksi sosial terhadap perbuatan/tindakan menyimpang ini -- khususnya korupsi -- bergantung pada jelas tidaknya penampakan perbuatan mereka dan besar kecilnya akibat buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan tadi. Salah satu aspek yang dapat dieksplorasi dalam hubungan ini ialah pola-pola respons kolektif terhadap berbagai macam tindakan menyimpang tertentu, baik di dalam satu kelompok maupun di antara berbagai kelompok sosial tertentu.

Analisa mengenai perilaku menyimpang dalam rangka orientasi reaksi sosial lebih mementingkan pada pengaruh-pengaruh dari proses reaksi terhadap perkembangan kepribadian seseorang yang diberi "label" sebagai penyimpang. Selain itu juga terhadap akibat dari peranan menyimpang yang diterapkan pada seseorang. Menganalisa pola-pola respons kolektif terhadap perilaku menyimpang merupakan suatu aspek yang penting,

karena hal tersebut akan dapat memberikan gambaran mengapa tindakan tertentu dinilai sebagai menyimpang dalam kolektivitas tersebut .^{22/}

Konsepsi perilaku menyimpang dalam pendekatan reaksi sosial menyatakan bahwa reaksi orang lain yang menetapkan suatu tindakan sebagai menyimpang. Reaksi ini, dapat berbeda-beda di dalam berbagai kelompok pada suatu kolektivitas dan atau antar kolektivitas .^{23/}

Suatu tindakan dapat ditetapkan sebagai menyimpang atau kriminal hanyalah berdasarkan karakteristik dari reaksi sosial terhadap tindakan tersebut. Reaksi ini bisa datang dari masyarakat pada umumnya, dari pejabat pejabat resmi atau dari organisasi politik tertentu.

Korupsi sebagai tindakan yang dianggap menyimpang ini pada dasarnya juga ditetapkan atas dasar reaksi dari masyarakat, pejabat resmi serta organisasi sosial. Adanya konflik nilai dalam masyarakat -- sebagai akibat dari adanya perubahan-perubahan nilai yang paling mendasar di masyarakat, yang dalam hal ini merupakan salah satu konsekuensi dari modernisasi -- dengan norma-norma dan sistem nilai yang diciptakan sendiri-sendiri, akan memudahkan timbulnya tingkah laku baru yang "semau gue" menurut selera dan kriteria sendiri, menyimpang dari pola tingkah laku umum.

22. Saparinah Sadli, op cit, hal 55

23. ibid., hal 50

Mendefinisikan perilaku menyimpang berdasarkan reaksi sosial mempunyai kegunaan sosial. Menentukan apa yang menyimpang dalam suatu kolektivitas adalah penting untuk keperluan membangkitkan atau mempertahankan kohesi sosial. Dengan demikian mendefinisikan perilaku menyimpang tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang dapat menunjang proses terciptanya efektivitas dari struktur sosial. Hal ini berkaitan pula dengan tindakan korupsi. Korupsi dapat muncul karena melemahnya institusi-institusi politik. Institusi politik ini mudah dibeli oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu, sehingga tidak mampu mempertahankan dan bahkan kehilangan otonomi, kewibawaan dan identitasnya sebagai bagian dari struktur. Mereka ini tidak mampu bertahan terhadap pengaruh oknum-oknum politik dengan ideologi serta kepentingan pribadi yang ekstrim. Kepentingan-kepentingan pribadi pemimpin lebih dominan daripada kepentingan umum.

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh individu-individu tersebut dapat pula dijelaskan dengan menggunakan teori tindakan yang dikemukakan oleh Parson. Komponen dasar dari tindakan menurut Parson adalah tujuan, alat, kondisi dan norma. Alat dan kondisi akan berbeda di mana individu yang bertindak itu mampu menggunakan alat dalam usahanya mencapai tujuan, kondisi merupakan situasi yang tidak

dapat dikontrol oleh individu yang bertindak itu.

Penjelasan tentang tindakan korupsi dari beberapa pendekatan dan teori ini agaknya memang tidak dapat dilepaskan dari kondisi serta situasi individu yang melakukannya, baik itu yang berasal dari dalam diri pribadi individu yang bersangkutan, maupun yang berasal dari luar, yaitu lingkungan sosial dan politiknya.

Selanjutnya, salah satu aspek yang dianggap penting oleh pendekatan reaksi sosial untuk dianalisa adalah fungsi dari pranata sosial. Hal ini disebabkan pranata sosial inilah yang melakukan kontrol sosial terhadap tingkah laku yang telah didefinisikan sebagai perilaku menyimpang. Misalnya, berdasarkan prinsip tertentu orang lain memutuskan seseorang sebagai persona non-grata, orang berbahaya, orang yang tidak dapat dipercaya dan berdasarkan pertimbangan moral merupakan orang yang kurang baik, maka sebagai konsekuensi dari reaksi tersebut sesuatu dilakukan terhadapnya, dan seringkali merupakan sesuatu yang kurang menyenangkan.

BAB IV

KESIMPULAN

Korupsi merupakan suatu tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna meengedduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.

Jadi korupsi merupakan gejala : salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi; salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal untuk memperkaya diri sendiri.

Tindak korupsi merupakan tindakan penyimpangan yang amat ditentang oleh masyarakat, karena tindakan itu tidak hanya merugikan sekelompok orang tertentu tetapi juga merugikan negara .

Sebagai perilaku menyimpang korupsi bertentangan dengan pola kelompok masyarakat setempat, tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku.

Munculnya korupsi karena lemahnya kontrol sosial dari institusi di masyarakat, di mana kontrol sosial bertujuan untuk meendidik dan mengajak bahkan memaksa anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Schoorl, J.W.. Mordenisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara Berkembang, terjemahan R.G. Soekadjo, Gramedia, Jakarta, 1984
- Poejawijatna., Etika Filsafat Tingkah Laku, Bina Aksara, Jakarta, 1986
- Veerger, K.J. Realitas Sosial, Gramedia, Jakarta, 1986
- Johnson, Doyle P. Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Gramedia, Jakarta, 1986
- Sadli, Saparinah., Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang, Jakarta, Bulan Bintang , 1976
- Soekanto, Soerdjono. Sosiologi Suatu Pengantar , CV Rajawali, Jakarta, 1982
- Alatas, Syed Husin. Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan data Kontemporer, LP3ES, Jakarta, 1983
- Kartono, Kartini. Patologi Sosial, CV Rajawali, Jakarta, 1981
- Lubis, MOchtar dan James C. Scott. Bunga Rampai Korupsi, LP3ES, Jakarta , 1985
- Poloma, Margaret. Sosiologi Kontemporer, CV Rajawali, Jakarta, 1987
- Hoogvelt, Ankie M.M. Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang, CV Rajawali, Jakarta, 1985
- Craib, Ian. Teori Sosial Modern dari Parson sampai Habermas, CV Rajawali, Jakarta, 1984

Penyakit koruptif timbul karena lemahnya sistem, dalam Kompas,
25 Pebruari 1989

Bakar, Ayip. Korupsi : Usang tapi Menantang , dalam Surabaya
Post, 9 Pebruari 1988.

UNIVERSITAS TERBUKA